

# ANALISA KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN 2007

## KABUPATEN GUNUNG KIDUL

Kebijakan Umum Anggaran merupakan kesepakatan antara Bupati dan DPRD Gunungkidul dalam rangka penyusunan APBD. KUA dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD 2007. KUA merupakan hasil musrenbang yang dilakukan oleh pemerintah Gunungkidul sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran. KUA adalah cerminan Kabupaten Gunungkidul setahun kedepan.

### Prioritas pembangunan Gunungkidul 2007:

Menyelesaikan masalah-masalah :

1. Kemiskinan
2. Pengangguran
3. Keteringgalan dengan daerah lain

### PLAFONISASI DANA

No	Urusan	Plafon	% Total	Peringkat
1	Belanja operasional SKPD	12,429,197,000	7.49	4
2	Pendidikan	25,246,193,000	15.21	2
3	Kesehatan	19,500,300,000	11.75	3
4	Pekerjaan umum	57,687,500,000	34.76	1
5	Perumahan	0	0.00	33
6	Tata ruang	175,000,000	0.11	29
7	Perencanaan pembangunan	2,371,900,000	1.43	12
8	Perhubungan	947,250,000	0.57	18
9	Lingkungan hidup	468,000,000	0.28	22
10	Pertanahan	10,000,000	0.01	32
11	Kependudukan dan catatan sipil	1,219,500,000	0.73	15
12	Pemberdayaan perempuan	253,000,000	0.15	27
13	Keluarga berencana & Kel. Sejahtera	963,250,000	0.58	17
14	Sosial	4,435,895,000	2.67	8
15	Tenaga kerja	1,411,900,000	0.85	14
16	Koperasi dan UKM	778,500,000	0.47	20
17	Penanaman modal	158,000,000	0.10	30
18	Kebudayaan	360,000,000	0.22	25
19	Pemuda dan olahraga	400,000,000	0.24	24
20	Kesatuan bangsa & politik dalam negeri	3,092,500,000	1.86	9
21	Pemerintahan umum	6,875,680,000	4.14	7
22	Kepegawaian	2,736,000,000	1.65	10
23	Pemberdayaan masyarakat desa	6,960,000,000	4.19	6
24	Statistik	225,000,000	0.14	28
25	Kearsipan	80,000,000	0.05	31
26	Komunikasi dan informasi	707,500,000	0.43	21
27	Pertanian	9,748,662,000	5.87	5
28	Kehutanan	1,039,000,000	0.63	16
29	Energi dan sumber daya mineral	425,000,000	0.26	23

30 Pariwisata	872,000,000	<b>0.53</b>	<b>19</b>
31 Kelautan dan perikanan	1,491,500,000	<b>0.90</b>	<b>13</b>
32 Perdagangan	2,546,500,000	<b>1.53</b>	<b>11</b>
33 Perindustrian	325,000,000	<b>0.20</b>	<b>26</b>

### Plafon dana tertinggi dan terendah

#### 7 urusan dengan plafon tertinggi

URUSAN	JUMLAH	%
Pekerjaan Umum	57,687,500,000	34.76
Pendidikan	25,246,193,000	15.21
Kesehatan	19,500,300,000	11.75
Belanja operasional SKPD	12,429,197,000	7.49
Pertanian	9,748,662,000	5.87
Pemberdayaan masyarakat desa	6,960,000,000	4.19
Pemerintahan umum	6,875,680,000	4.14

#### 7 urusan dengan plafon terendah

URUSAN	JUMLAH	%
Perumahan	0	0
Pertanahan	10,000,000	0.01
Kearsipan	80,000,000	0.05
Penanaman modal	158,000,000	0.10
Tata ruang	175,000,000	0.11
Statistik	225,000,000	0.14
Pemberdayaan perempuan	253,000,000	0.15

### ANALISA TERHADAP KUA GUNUNG KIDUL 2007:

- draft KUA Gunungkidul tahun anggaran 2007 kebijakan umum pembangunan kabupaten Gunungkidul diarahkan untuk menyelesaikan masalah mendesak seperti kemiskinan, pengangguran dan ketertinggalan dengan daerah lain
- Arah kebijakan umum anggaran (prioritas program) tidak sinkron dengan plafonisasi anggaran. Urusan Pekerjaan Umum menghabiskan plafon sekitar 34,76% sangat kontras dengan pemberdayaan masyarakat desa yang hanya 4,19%.
- Pemerintah berencana memanfaatkan potensi sumberdaya alam melalui kerjasama dengan investor. Ingat investor tidak selamanya memberikan keuntungan yang berlipat tetapi malah menyengsarakan masyarakat sekitar. Prasyarat masuknya investor dengan pemberdayaan masyarakat dan jaminan tidak merusak alam serta kearifan lokal harus ditegaskan dalam KUA.
- KUA tidak menjelaskan secara rinci apakah alokasi anggaran itu akan dibiayai oleh APBD, pemerintah propinsi atau pemerintah pusat. Pemerintah juga perlu mempertegas apakah program yang dibuat dalam TA 2007 apakah ada yang didanai oleh hutang luar negeri atau tidak.
- Dalam APBD Gunungkidul tahun anggaran 2005/2006 sumber Pendapatan Asli Daerah tertinggi jika diambil 5 (lima) besar berturut-turut adalah Retribusi kesehatan, retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah, pajak penerangan jalan umum, retribusi pasar dan retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga. Retribusi kesehatan bahkan melebihi target dari 6,9 M menjadi 10,4 M, hal ini tentunya sangat memprihatinkan karena orang sakit (miskin pula) menjadi mesin penghasil uang bagi pemda, padahal layanan untuk mereka masih sangat dipertanyakan. Pemerintah seharusnya lebih berani melakukan terobosan-terobosan untuk memperoleh PAD dari sektor diluar urusan masyarakat miskin, misal pariwisata pantai yang selama ini kurang terkelola dengan baik, atau sektor perikanan dan kelautan karena gunungkidul memiliki potensi kelautan yang cukup menjanjikan, sehingga ketergantungan pada DAU dan DAK bukanlah alasan untuk memungut "upeti" dari rakyatnya.

### 5 Penyumbang PAD Tertinggi

Rank	Jenis PAD	Dinas pengelola	Jumlah
1	Retribusi kesehatan	Dinas kesehatan	<b>10, 41 M</b>
2	Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah	Dinas Peternakan	<b>4, 28 M</b>
3	Pajak penerangan jalan	Bakuda	<b>2, 50 M</b>
4	Retribusi pasar	Disperindag	<b>1, 31 M</b>
5	Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga	Disparbud	<b>0, 72 M</b>

- Dalam rangka mendorong akuntabilitas program dan anggaran, adanya audit atas pelaksanaan proyek pembangunan adalah hal mutlak yang harus dilakukan. Komitmen pemerintah bahwa akan ada audit yang dilakukan untuk proyek-proyek pembangunan merupakan langkah positif yang harus didukung semua pihak. Namun, ada beberapa kelemahan dalam mekanisme audit ini, yang terfokus pada audit finansial (keuangan). Beberapa aspek lain seperti ketiadaan audit kinerja program dan anggaran, hingga keterbatasan cakupan karena menggunakan mekanisme sampling harus dilengkapi dengan second opinion dari sumber yang lain. *Participatory auditing* harus dimulai sebagai suatu langkah melibatkan masyarakat. Selain itu second opinion dari auditor independen juga diperlukan.

1. Berikut ini adalah beberapa contoh perbandingan program atau kegiatan pemerintah yang terlalu besar dan program untuk masyarakat yang terlalu kecil.

No	Program/kegiatan	Organisasi	Pagu
1	Rehabilitasi gedung dinas/ cabang dinas, pengadaan peralatan kantor	Dinas Pendidikan	4,1 M
2	Pengadaan 5 unit mobil dinas	Bag. Perkap	1 M
3	Pengadaan pakaian dinas	Bag. Perkap	1,4 M
4	Pembangunan terminal wonosari	Dinas PU	3 M
5	Pendamping kontruksi JICA	Dinas PU	5 M
6	Pendidikan kedinasan	Kantor diklat	1,3 M

No	Program/kegiatan	Organisasi	Pagu
1	Pencegahan cacangan anak SD	Dinkes	12 Jt
2	Kesehatan lansia	Dinkes	58 Jt
3	Pemasyarakatan teknologi tepat guna	Dinsobermas	30 Jt
4	Pendampingan kewirausahaan industri kecil dan rumah tangga	Dinsobermas	60 Jt
5	Pelatihan manajemen UED – SP	Dinsobermas	20 Jt
6	Bimbingan kerja memasuki dunia kerja	Dinakertrans	5 Jt
7	Pemberdayaan kelompok perempuan		Tidak jelas